



SALINAN

LURAH POTORONO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN POTORONO

NOMOR 4 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO  
NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH POTORONO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang menekankan bahwa adanya Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, adanya perubahan Besaran Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perubahan APB Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan mengenai Perubahan APB Kalurahan dan tetap mempedomani RKP Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 tentang Daftar Kalurahan Penerima Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Tahun Anggaran 2026, adanya perubahan jumlah nominal bantuan keuangan PPBMP;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Potorono tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 119);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 146);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);

25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 33);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 26);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 27);
30. Keputusan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2026 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
31. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/900.1/4/B2 Tahun 2026 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kalurahan yang Bersumber dari APBD DIY Tahun Anggaran 2026;
32. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/900.1.12/02925/DPMK Tahun 2026 tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
33. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2030 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 2);

35. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7);
36. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
37. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 10);
38. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2026 Nomor 2);
39. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2026 Nomor 3);
40. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2025 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO  
dan  
LURAH POTORONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN POTORONO NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, semula berjumlah Rp4.854.145.784,72 (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Dua Rupiah) berkurang menjadi Rp3.975.352.746,18 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Koma Delapan Belas Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Semula	Rp4.629.798.010,40
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(1.021.070.001,16)
Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah Perubahan	Rp3.608.728.009,24
2. Belanja Kalurahan	
a. Semula	Rp4.854.145.784,72
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(818.793.038,54)
Jumlah Belanja Kalurahan setelah Perubahan	Rp3.975.352.746,18
Surplus/(Defisit)	Rp(366.624.736,94)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Semula	Rp224.347.774,32
b. Bertambah/(berkurang)	Rp142.276.962,62
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp366.624.736,94

### Pasal 2

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Kalurahan	
a. Semula	Rp421.635.395,40
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(38.096.086,16)
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah Perubahan	Rp383.539.309,24
2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp4.197.237.615,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(979.394.265,00)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp3.217.843.350,00
3. Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	Rp10.925.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(3,579,650.00)
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah Perubahan	Rp7.345.350,00

### Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	
a. Semula	Rp2.380.560.734,42
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(147.298.331,24)
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan setelah Perubahan	Rp2.233.262.403,18

2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	
a. Semula	Rp1.394.332.600,30
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(350.373.007,36)
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan setelah Perubahan	Rp1.043.959.593,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp738.033.150,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(347.209.750,00)
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Setelah Perubahan	Rp390.823.400,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp308.819.300,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(12.311.950,00)
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan	Rp296.507.350,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	
a. Semula	Rp32.400.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp(21.600.000,00)
Jumlah Belanja Bidang Penanggulangan, Darurat dan Mendesak Kalurahan Setelah Perubahan	Rp10.800.000,00

#### Pasal 4

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp224.347.774,32
b. Bertambah/(berkurang)	Rp142.276.962,62
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp366.624.736,94
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Potorono.

Ditetapkan di Potorono  
Pada tanggal, 25 Mei 2026  
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono  
Pada tanggal, 25 Mei 2026  
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO

LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2026 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL: (24/POTORONO/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,



RAHARJO, S.T.